



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2022

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

-  (0271) 495194,494845
-  bkpsdm@karanganyarkab.go.id
-  <http://bkpsdmkaranganyarkab.go.id>
-  Jl. Majapahit (komplek perkantoran
Gangkalan)



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar adalah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sekaligus merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian, maka sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Bupati Karanganyar perlu membuat dan menyusun laporan atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun.

Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 merupakan salah satu bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang sekaligus untuk diinformasikan kepada masyarakat seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang pelaksanaannya diatur Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Unit Kerja merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022. Laporan Pelaksanaan Tugas ini untuk menginformasikan pencapaian indikator tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

DESKRIPSI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. Tugas dan Fungsi

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang pelaksanaannya diatur Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.

1. Tugas

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

2. Fungsi

- a. Penyusunan Kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB.
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang pelaksanaannya diatur Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar tidak melaksanakan urusan wajib, melainkan urusan penunjang bidang Pemerintahan.

C. Standard Operating Procedure (SOP).

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Renja
4. SOP LkjIP
5. SOP Penyusunan RKA
6. SOP Pengusulan Perbaikan dan Pendistribusian SK Konversi NIP
7. SOP Pengusulan Surat Ijin Belajar
8. SOP Pengusulan Surat Tugas Belajar
9. SOP Pengiriman Diklat Kepemimpinan
10. SOP Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan
11. SOP Pengiriman Diklat Prajabatan CPNS
12. SOP Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS
13. SOP Pengiriman Diklat Teknis Fungsional
14. SOP Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional
15. SOP Kenaikan Pangkat
16. SOP Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
17. SOP Kenaikan Gaji Berkala bagi Kepala OPD dan Jabatan Fungsional tertentu Golongan IV/c keatas
18. SOP Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
19. SOP Pengelolaan Jabatan Fungsional
20. SOP Penyelesaian Usul Jaminan Kecelakaan kerja / Jaminan Kematian
21. SOP Pengajuan Kartu Istri (Karis) dan Kartu Suami (Karsu)
22. SOP Pemberian Surat Izin Perkawinan dan Perceraian

23. SOP Melaksanakan Pengusulan dan Penyampaian Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya
24. SOP Pengajuan Uji Kesehatan
25. SOP Melaksanakan Pelayanan Tapera
26. SOP Pengajuan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (ID Card)
27. SOP Pengajuan Kartu Pegawai
28. SOP Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
29. SOP Pemberian Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil
30. SOP Pelayanan Pensiun Dipercepat karena Sakit (tidak cakap jasmani / rohani)
31. SOP Pelayanan Pengajuan Pengembalian Tapera Pegawai Negeri Sipil
32. SOP Pelayanan Pensiun Dini / Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil
33. SOP Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil
34. SOP Pelayanan Pengajuan Kartu Taspen Pegawai Negeri Sipil
35. SOP *Punishment* tentang Pelanggaran Calon Pegawai Negeri Sipil
36. SOP *Punishment* Pemberhentian Sementara
37. SOP *Punishment* Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
38. SOP *Punishment* Disiplin Pegawai Negeri Sipil
39. SOP *Punishment* Pemberhentian menjadi Anggota / Pengurus Partai Politik

D. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor : 8 tahun 2021

Tanggal : 10 Desember 2021

Tentang : APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022.

2. Peraturan Bupati Karanganyar

Nomor : 89 tahun 2022

Tanggal : 29 September 2022

Tentang : Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022.

E. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang pelaksanaannya diatur Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 120 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar. Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat :
 - Sub Bagian Umum
3. Bidang Pengangkatan dan Mutasi
4. Bidang Informasi dan Pengembangan SDM
5. Bidang Pembinaan

STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR SESUAI PERDA KAB.KARANGANYAR



Susunan Pejabat Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan : Suprpto, S.H, M.M
2. Sekretaris : Dwi Amperawati, S.I.P, M.Si
 - a. Ka. Sub Bagian Umum : Irine Magdalena Elsy, S.E
3. Kepala Bidang Pengangkatan & Mutasi : Sawiji Hartanto, S.I.P,M.M
4. Kepala Bidang Informasi dan Pengembangan SDM : Isniari Dewi M, S.STP.
5. Kepala Bidang Pembinaan : Dwi Wahyuningsih, S.H, M.M.

F. Kepegawaian:

a. Jumlah Pegawai

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar didukung oleh 40 orang aparatur yang keseluruhannya telah diangkat menjadi PNS.

DAFTAR PEGAWAI

NO	NAMA	NIP	STATUS KEPEGAWAIAN (PNS/CPNS)	PANG KAT/ GOL.
1	Suprpto, S.H, M.M	NIP. 19630421 199003 1 009	PNS	IV/c
2	Dwi Amperawati, S.I.P,M.Si	NIP. 19670110 198603 2 001	PNS	IV/b
3	Dwi Wahyuningsih, S.H, M.M	NIP. 19690711 199603 2 002	PNS	IV/a
4	Isniari Dewi M, S.STP	NIP. 19770124 199703 2 004	PNS	III/d
5	Sawiji Hartanto, S.I.P,M.M	NIP. 19710803 199203 1 004	PNS	IV/a
6	Drita Evana S., S.Psi, M.M	NIP. 19781029 200312 2 005	PNS	IV/a
7	Endar Pangestuti, S.E	NIP. 19720605 199603 2 001	PNS	III/d
8	Dessy Marsistawati, S.E	NIP. 19721215 199803 2 005	PNS	III/d
9	Irine Magdalena Elsy, SE	NIP. 19810920 200902 2 003	PNS	III/d
10	Djoko Sumarsono, S.E	NIP. 19740111 199603 1 002	PNS	III/d
11	Janes Cucuk Hartanto, SE, MM	NIP. 19830122 200901 1 005	PNS	III/d
12	Diana Ary Andriyati, S.H	NIP. 19830704 200604 2 008	PNS	III/d
13	Aris Kurniawan, SH, M.Si	NIP. 19750503 200501 1 009	PNS	IV/a
14	Joko Prasetyo, S.I.P	NIP. 19880424 201101 1009	PNS	III/c

15	Naniek Haryani, S.E	NIP. 19661224 198603 2 007	PNS	III/d
16	Joko Pramono, SE	NIP. 19701123 201001 1 005	PNS	III/c
17	Lulus Nugroho, S.Psi	NIP. 19790411 201001 1017	PNS	III/c
18	Tweyrianti Nuzulita S, S.Psi, M.M	NIP. 19780121 201001 2 015	PNS	III/c
19	V Nining Aryanti, S.Sos, M.M	NIP. 19761107 201001 2 010	PNS	III/c
20	Yoppy Nursendy Budiarmo, S.E, M.M	NIP. 19861115 201101 1 009	PNS	III/c
21	Yusuf Mustofa, S.Si	NIP. 19781120 201001 1 011	PNS	III/c
22	Romi Erlandono, S.Psi	NIP. 19730513 200604 1 005	PNS	III/c
23	SR. Widyastuti	NIP. 19700101 199303 2 015	PNS	III/b
24	Anggara Nur Patria, S.Psi	NIP. 19850528 201101 1 004	PNS	III/c
25	Wahyu Yetti Isrudatini, S.AB, M.M	NIP. 19830131 201001 2 020	PNS	III/b
26	Rizky Oktaria, S.Psi	NIP. 19901027 201403 2 002	PNS	III/b
27	Sugiyarto, SE	NIP. 19800322 200604 1 011	PNS	III/b
28	Faridatul Umniyah, S.STP	NIP. 19940405 201609 2 003	PNS	III/b
29	Luqi Hermaya, S.STP	NIP. 19950921 201708 2 002	PNS	III/b
30	Joko Suwarno, A.Md	NIP. 19830211 201001 1 011	PNS	III/a
31	Adrian Unggul Wirawan, A.Md	NIP. 19820620 201101 1 013	PNS	III/a
32	Suroso Budi Santoso, S.A.P	NIP. 19740719 200501 1 001	PNS	III/a
33	Rini Setyawati, S.Kom	NIP. 19920331 201903 2 010	PNS	III/a
34	Efra Radisya Clariti, S.STP	NIP. 19980331 202008 2 001	PNS	III/a
35	Alvia Callista Makarim, S.Tr.IP	NIP. 19970118 202108 2 001	PNS	III/a
36	Pratiwi Ramadhani, S.Tr.IP	NIP. 19990116 202108 2 002	PNS	III/a
37	Yuni Setyawati	NIP. 19870611 200902 2 006	PNS	II/d
38	Muklis Shotus Salamah, A.Md. AK	NIP. 19980430 202203 2 012	PNS	II/c
39	Atik Sulistyowati, S.Kom	NIP. 19790525 200801 2 019	PNS	II/c
40	Suparno	NIP. 19811203 201001 1 003	PNS	I/c

b. Daftar Pejabat Struktural OPD Yang Terisi

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
1	Suprpto, S.H, M.M	Kepala BKPSDM	SUDAH	SUDAH
2	Dwi Amperawati, S.I.P,M.Si	Sekretaris BKPSDM	SUDAH	SUDAH

3	Isniari Dewi M, S.STP	Kepala Bidang Informasi dan Pengembangan SDM	SUDAH	SUDAH
4	Dwi Wahyuningsih, S.H., M.M.	Kabid. Pembinaan	SUDAH	SUDAH
5	Sawiji Hartanto, S.I.P, M.M	Kabid. Pengangkatan dan Mutasi	SUDAH	SUDAH
6	Irine Magdalena Elsyse, SE	Kasubbag. Umum	SUDAH	SUDAH

c. Daftar Pejabat Struktural Yang Belum Terisi

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
1		
2		
3		

d. Daftar Pejabat Fungsional (umum/khusus)

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Drita Evana S,S.Psi,Psi,M.M	Assesor SDM Aparatur Ahli Muda
2	Endar pangestuti, S.E	Perencana Ahli Muda
3	Dessy Marsistawati, S.E	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
4	Djoko Sumarsono	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
5	Janes Cucuk Hartanto, S.E,M.M	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
6	Diana Ary Andriyati, S.H	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
7	Aris Kurniawan, S.H, M.Si	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
8	Joko Prasetyo, S.I.P	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
9	Lulus Nugroho, S.Psi	Analisis Kepegawaian Muda
10	Tweyrianti Nuzulita S, S.Psi, M.M	Analisis Kepegawaian Muda
11	V Nining Aryanti, S.Sos, M.M	Analisis Kepegawaian Muda
12	Wahyu Yetti Isrudatini, S.AB, MM	Analisis Kepegawaian Pertama
13	Adrian Unggul Wirawan, A.Md	Pranata Komputer Mahir
14	Anggara Nur Patria, S.Psi	Analisis Kepegawaian Muda
15	Rizky Oktaria, S.Psi	Analisis Kepegawaian Pertama

e. Daftar Pejabat Fungsional yang belum terisi

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Arsiparis Terampil	Belum terisi
2	Assesor Madya	Belum terisi
3	Assesor Pertama	Belum terisi

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

1. Kepegawaian

No	IKK Output dan Capaian Kinerja	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100\%$	Pembilang = 1650.00 ASN Penyebut = 916.00 ASN Hasil = 180,13
2		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	Pembilang = 532.00 ASN Penyebut = 2566.00 ASN Hasil = 20,73
3		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	Pembilang = 418.00 ASN Penyebut = 532.00 ASN Hasil = 78,57

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Perencanaan, Panganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.840.000,00 Persentase: (96,80%)	Jumlah rencana kerja perubahan anggaran sub kegiatan 40 sub kegiatan	sub kegiatan (%)		
				2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.840.000,00 Persentase: (96,80%)	Jumlah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran 40 sub kegiatan	37 sub kegiatan (92.50%)		
				3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 20.000.000,00	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun 5	5 jenis (100.00%)		

				Realisasi: Rp. 20.000.000,00 Persentase: (100,00%)	jenis			
			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 6.247.960.980,00 Realisasi: Rp. 4.331.886.197,00 Persentase: (69,33%)	Jumlah ASN yang mendapat gaji 1 tahun	1 tahun (100.00%)	Adanya titipan gaji PPPK tahun 2022	? untuk penganggaran tahun depan harus lebih cermat lagi
				2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Anggaran: Rp. 20.000.000,00 Realisasi: Rp. 20.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah laporan pengelolaan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran) 4 jenis	4 jenis (100.00%)		
			c. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 5.094.000,00 Realisasi: Rp. 5.094.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan 10 jenis	10 jenis (100.00%)		

				2) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.999.900,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah arsip surat masuk dan arsip surat keluar sesuai kode surat 3500 arsip	3500 arsip (100.00%)		
				3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 25.135.500,00 Realisasi: Rp. 25.085.000,00 Persentase: (99,80%)	Jumlah ATK yang disediakan Jumlah laporan keuangan yang tersusun 6 jenis	6 jenis (100.00%)		
				4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 25.000.000,00 Realisasi: Rp. 25.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan 3 jenis	3 jenis (100.00%)		
				5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran: Rp. 1.500.000,00 Realisasi: Rp. 1.380.000,00 Persentase: (92,00%)	Jumlah bahan bacaan dan perundangan-undangan yang disediakan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat koordinasi	2 jenis (100.00%)		

			SKPD Anggaran: Rp. 300.529.500,00 Realisasi: Rp. 298.934.239,00 Persentase: (99,47%)	konsultasi luar daerah yang diselenggarakan 2 jenis			
		d. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran: Rp. 25.000.000,00 Realisasi: Rp. 23.100.000,00 Persentase: (92,40%)	Tersediannya kendaraan operasional 1 unit	1 unit (100.00%)		
			2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 131.350.000,00 Realisasi: Rp. 129.837.485,00 Persentase: (98,85%)	Tersediannya perlengkapan dan peralatan kantor 8 jenis barang	8 jenis barang (100.00%)		
		e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH, Kegiatan	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 4.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.000.000,00	Jumlah jasa surat menyurat yang terbayar 430 surat	430 surat (100.00%)		

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase: (100,00%)				
				2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 127.900.000,00 Realisasi: Rp. 119.587.931,00 Persentase: (93,50%)	Jumlah jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang terbayar 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 116.873.000,00 Realisasi: Rp. 83.020.000,00 Persentase: (71,03%)	Jumlah jasa kebersihan kantor dan peralatan yang terbayar 7 jenis barang	7 jenis barang (100.00%)		
		f.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran: Rp. 183.339.000,00 Realisasi: Rp. 174.219.553,00 Persentase: (95,03%)	Jumlah kendaraan dinas/operasioanal yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala 3 jenis kegiatan	3 jenis kegiatan (100.00%)		

			Daerah					
				2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 41.489.000,00 Realisasi: Rp. 40.985.000,00 Persentase: (98,79%)	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin 7 jenis sarana	7 jenis sarana (100.00%)		
				3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 183.000.000,00 Realisasi: Rp. 182.550.500,00 Persentase: (99,75%)	Jumlah gedung dan taman kantor yang direhab 1 tahun	1 tahun (100.00%)		

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Nihil

E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI
--------	------------------------	----------------	-------------------------	---------------------	--------	-----------	--------------	--------------------

							PERMASALAHAN
1.	KEPEGAWAIAN	a.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH, Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Anggaran: Rp. 40.000.000,00 Realisasi: Rp. 38.707.500,00 Persentase: (96,77%)	Jumlah sajian informasi kepegawaian PNS 9712 orang	10400 orang (107.08%)	
				2) Pengelolaan Data Kepegawaian Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.941.500,00 Persentase: (98,83%)	Jumlah dokumentasi arsip digital pegawai ASN 2500 arsip	2500 arsip (100.00%)	
				3) Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.601.200,00 Persentase: (97,34%)	Data pegawai yang tersusun antara SAPK dan Simpeg 9712 orang	10400 orang (107.08%)	
				4) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Anggaran: Rp. 750.000.000,00 Realisasi: Rp. 533.992.028,00 Persentase: (71,20%)	Jumlah Pengadaan PPPK 722 orang	796 orang (110.25%)	Pada awal penganggaran PPPK kita anggarkan untuk semua test PPPK baik tenaga kesehatan, tenaga guru dan tenaga
							?untuk penganggaran tahun depan harus lebih cermat lagi

							teknis lainnya di laksanakan pada tahun 2022, ternyata pada kenyataannya yang bisa dilaksanakan pada tahun 2022 hanya test untuk PPPK tenaga kesehatan sedangkan untuk formasi guru dan tenaga teknis dilaksanakan pada tahun 2023	
				5) Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Anggaran: Rp. 21.000.000,00 Realisasi: Rp. 18.315.000,00 Persentase: (87,21%)	Jumlah penganggakata n CASN dan kegiatan penyerahan SK CASN dan Penyerahan SK PNS 1990 orang	1365 orang (68.59%)	Karena kegiatan diawal tahun 2022 dan sampai sekarang proses seleksi belum selesai dan berlanjut ditahun 2023	Koordinasi dengan instansi pembimbing KEMENPAN RB
				6) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Anggaran: Rp. 68.000.000,00 Realisasi: Rp. 65.680.000,00 Persentase: (96,59%)	Terbitnya SK pensiun PNS 500 PNS	559 PNS (111.80%)		
		b. PROGRAM K EPEGAWAIA	1) Pengelolaan Mutasi ASN Anggaran:	Penataan PNS sesuai dengan	235 orang (15.67%)	Penataan ASN yang direncanakan	Koordinasi pada instansi	

			N DAERAH, Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Rp. 30.000.000,00 Realisasi: Rp. 25.087.300,00 Persentase: (83,62%)	analisis jabatan dan pemindahan PNS antar instansi 1500 orang		pada akhir tahun 2022 pada kenyataannya tidak dapat terealisasi karena proses seleksi dalam penentuan penempatan masih harus berlanjut pada tahun 2023	pembimbing seperti BKN Pusat, BKN Regional 1 dan BKD provinsi
				2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Anggaran: Rp. 40.000.000,00 Realisasi: Rp. 38.449.500,00 Persentase: (96,12%)	Jumlah kenaikan pangkat PNS, peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat golongan/penyesuaian Ijazah 1600 orang	3599 orang (224.94%)		
				3) Pengelolaan Promosi ASN Anggaran: Rp. 499.000.000,00 Realisasi: Rp. 302.456.850,00 Persentase: (60,61%)	Jumlah kenaikan, perpindahan dan perubahan jabatan struktural dan pengisian pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi 600 Jabatan	231 Jabatan (38.50%)	Kegiatan seleksi terbuka promosi masih menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan untuk pelaksanaan kegiatan seleksi tahapannya melewati tahun anggaran 2022.	Koordinasi ke instansi pembimbing dalam hal ini BKN dan Kemendagri dan untuk penganggaran tahun depan harus lebih cermat lagi
			c. PROGRAM K EPEGAWAIA	1) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah kenaikan,	498 orang (83.00%)		

			N DAERAH, Kegiatan Peng embangan Kompetensi ASN	Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.397.000,00 Persentase: (93,97%)	perpindahan dan perubahan jabatan fungsional khusus 600 orang		
				2) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Anggaran: Rp. 451.767.900,00 Realisasi: Rp. 357.882.900,00 Persentase: (79,22%)	Jumlah penerima beasiswa kepada PNS yang tugas belajar dan jumlah surat ijin belajar, tugas belajar, surat ijin pemakaian gelar, ijazah bagi PNS yang diterbitkan 204 orang	173 orang (84.80%)	
			d. PROGRAM K EPEGAWAIA N DAERAH, Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Anggaran: Rp. 370.000.000,00 Realisasi: Rp. 366.486.800,00 Persentase: (99,05%)	Jumlah PNS yang membuat SKP dan penilaian kerja PNS 8500 orang	9036 orang (106.31%)	
				2) Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Anggaran: Rp. 42.000.000,00 Realisasi: Rp. 41.595.000,00	Jumlah ajuan berkas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dan	42 OPD (100.00%)	

				Persentase: (99,04%)	jumlahajuan cuti PNS dan pembekalan pra purna tugas 42 OPD		
				3) Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.566.900,00 Persentase: (91,34%)	Jumlah berkas permohonan mendapatkan piagam penghargaan satya lancana karya saty 150 orang	150 orang (100.00%)	
				4) Pembinaan Disiplin ASN Anggaran: Rp. 67.000.000,00 Realisasi: Rp. 63.273.500,00 Persentase: (94,44%)	Jumlah peserta kegiatan penyelesaian pelanggaran disiplin 42 OPD	42 OPD (100.00%)	
				5) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Anggaran: Rp. 75.000.000,00 Realisasi: Rp. 73.207.000,00 Persentase: (97,61%)	Terbitnya ijin perkawinan dan perceraian bagi PNSD 6 sidang	8 sidang (133.33%)	
2.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	a.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, Kegiatan Peng	1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	Jumlah peserta Diklat, Bintek, Workshop, Sosialisasi, Capacity Building dan	3082 orang (77.05%)	

			embangan Kompetensi Teknis	Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Anggaran: Rp. 743.801.900,00 Realisasi: Rp. 623.267.450,00 Persentase: (83,79%)	study Comparatif 4000 orang			
			b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Anggaran: Rp. 776.148.200,00 Realisasi: Rp. 676.371.000,00 Persentase: (87,14%)	Jumlah pengiriman peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II yang di kirim dan jumlah pengiriman / penyelenggaraan pelatihan dasar dan prajabatan CPNS 75 orang	75 orang (100.00%)		

G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN*Nihil***H. UNSUR KEWILAYAHAN***Nihil***I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM***Nihil***J. UNSUR KEKHUSUSAN***Nihil*

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2022 sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang tidak mendapat tugas pembantuan.

BAB VI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang pelaksanaannya diatur Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar, BKPSDM tidak melaksanakan urusan wajib melainkan melaksanakan urusan penunjang jadi tidak menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga tidak ada pencapaian standar Pelayanan Minimal.

BAB VII

INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. Inovasi

Inovasi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar tahun 2022.

No	Nama Inovasi	OPD (Inovator)	Diskripsi Inovasi
1	2	3	4

B. Penghargaan

Penghargaan yang diterima oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar tahun 2022.

No	Nama Penghargaan	Instansi Penerima	Instansi Pemberi Penghargaan
1	2	3	4
	Perangkat daerah yang memperoleh kategori "memuaskan (A)" tentang kearsipan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sekaligus merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selama Tahun 2022, dari 3 program dengan 37 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target kinerja atau kurang optimal dalam implementasinya. Diantara kegiatan tersebut yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Pengelolaan Promosi.

B. SARAN

Untuk dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar, maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu salah satunya dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik di internal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar. Maupun pihak eksternal dengan OPD di Kabupaten Karanganyar serta instansi vertikal, meliputi lembaga pengelola kepegawaian tingkat regional, tingkat provinsi maupun tingkat pusat.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar yaitu perlu diadakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM.

Selain itu pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan akan mampu meningkatkan kinerja agar pelayanan lebih maksimal.